

BAB II

LANDASAN TEORITIS

1.1 TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa pertanyaan yang dianggap relevan. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Pertama skripsi yang disusun oleh Muhammad Yasin dengan judul “Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbolharjo dibidang kesehatan¹”. Skripsi ini lebih memaparkan tentang peranan camat dalam mengkoordinasikan pemerintah kelurahan di kecamatan Umbolharjo dibidang kesehatan dan dalam penelitiannya menyimpulkan peran Camat secara umum dalam mengkoordinasikan pemerintahan terutama dibidang kesehatan di kelurahan-kelurahan di kota

Yogyakarta.Ke dua jurnal karya Akmal khairi. Tentang analisis pemberdayaan peran dan fungsi camat ²”. Dengan tujuan penelitian untuk membahas secara umum dan mendalam tentang bagaimana peran camat dalam pemberdayaan masyarakat.

¹ Muhammad Yamin, peranan camat dalam mengkoordinasikan pemerintah kelurahan di Kecamatan Umbol Harjo dibidang kesehatan”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

² Akmal khairi. Tentang analisis pemberdayaan peran dan fungsi camat.jurnal ilmu administrasi dan organisasi,mei-agustus 2010,halaman 160-169

Ketiga skripsi karya Muh Nurdin, “Tentang peran Pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di kecamatan biringbulu kabupaten gowa³”. Dengan tujuan penelitian untuk menganbarkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat petani jagung di kabupaten gowa.

Ke empat skripsi karya Norlyn Alexandra Roslia Liwu yang berjudul “peran camat selaku coordinator pelaksanaan pembangunan fisik desa di kecamatan kupang timur⁴”. Dengan tujuan penelitian untuk mengambarkan bagaimana camat menjalankan tugas dan fungsinya selaku koordinator dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa, baik kepada aparatur maupun masyarakat desa.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang peran camat dalam mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah, pertama lokasi wilayah penelitian dimana focus wilayah penelitian penulis adalah di kecamatan Wae Rii kabupaten Manggarai, kedua regulasi yang digunakan dalam penulisan skripsi dimana menggunakan regulasi terbaru yaitu, Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.

³ Muh Nurdin . Tentang peran Pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di kecamatan biringbulu kabupaten gowa . Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar 2014

⁴ Norlyn Alexandra Roslia Liwu .peran camat selaku coordinator pelaksanaan pembangunan fisik desa di kecamatan kupang timur”.Skripsi kupang,Universitas Widya Mandira 2008

1.2 LANDASAN TEORI

1.2.1 KOORDINASI CAMAT

1. Pengertian koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinate* yang berarti *to regulate* dari pendekatan empiric yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kaitan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal inrank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.⁵

Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana, ⁶Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerrakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil” . sedangkan menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat

⁵ Taliziduhu Ndraha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*.. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.hal.290

⁶ Inu Kencana Syafie. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.hal.33

diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.⁷

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

2. Bentuk Koordinasi

Menurut Inu Kencana⁸

a. Koordinasi Horizontal

⁷ Hasibuan, Melayu. 2011. Manajemen Dasar, pengertian, dan masalah. Jakarta: Bumi Aksara.hal.86

⁸ Inu Kencana Syafie. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung : Pustaka Reka Cipta.hal.33

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

3. Ciri-Ciri Koordinasi

Menurut Handyaningrat, menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut⁹:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada

⁹ Soewarno Handyaningrat. 1989. pengantar ilmu administrasi dan manajemen. Jakarta. PT. Gunung Agung. hal. 118

pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.

- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.

4. Fungsi Koordinasi

Menurut Handyaningrat menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai

berikut¹⁰:

- a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.
- b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.
- c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/sinkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata

¹⁰ Ibid.hal 119-121

tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.

- e. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi- fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.

5. Tujuan Koordinasi

Tujuan Koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tinginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-

kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.

3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Dalam melakukan koordinasi seorang pemimpin dapat melakukan beberapa cara, menurut Soetarto cara-cara melakukan koordinasi yaitu¹¹ :

1. pertemuan informal antara pejabat
2. pertemuan formal antara para pejabat yang disebut rapat koordinasi
3. membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan
4. membuat penyebaran kartu
5. mengangkat coordinator
6. membuat buku pedoman berorganisasi, pedoman tata kerja dan pedoman peraturan
7. melalui alat penghubung, misalnya telepon dan lain-lain
8. membuat tanda-tanda
9. membuat symbol
10. membuat kode

cara-cara melakukan koordinasi seperti tersebut di atas, dalam penerapannya tentu harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis aktifitas dari suatu organisasi. Sehingga bagi organisasi publik seperti kecamatan, cara koordinasi yang biasa dilakukan adalah melalui :

¹¹ Sutarto.1993. Dasar Dasar Organisasi.Yogyakarta. Gajhamada University Press

- pertemuan formal, biasa di sebut rapat koordinasi. Dalam pertemuan ini pemimpin atau (camat) memberikan pengarahan dan penjelasan kepada pihak pelaksana dan kepada masyarakat tentang kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan serta saran-saran yang akan diwujutkan yakni untuk kepentingan masyarakat.
- pertemuan informal, yakni pertemuan yang dilakukan dengan pihak-pihak pelaksana di luar jam dinas, dan mendatangi langsung kelokasi dimana kegiatan di laksanakan.
- Koordinasi langsung dilapangan, yaitu camat mendatangi langsung ketempat-tempat (lokasi) dimana kegiatan dilaksanakan

2.2.2 KONSEP KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Robinson 1994 menjelaskan bahwa: “Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan

bertindak.” Ife 1995 mengemukakan bahwa: “Pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi “power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.” Payne, menjelaskan bahwa: “Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. ¹²

Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.” Proses Pemberdayaan Pranarka & Vidhyandika, menjelaskan bahwa: “Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. ¹³

¹² Payne, 1997: 266 dalam buku “Modernsocial work theory”

¹³ Pranaka dan Vidhyandika. 1996. Pemberdayaan (Empowerment). Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS).

Sumardjo, menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: Mampu memahami diri dan potensinya, Mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), Mampu mengarahkan dirinya sendiri, Memiliki kekuatan untuk berunding, Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama, yang saling menguntungkan, dan Bertanggungjawab atas tindakannya.¹⁴

Slamet menjelaskan lebih rinci bahwa: “Yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.”¹⁵,

Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Jamasy, mengemukakan bahwa: “Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan

¹⁴ Sumardjo, 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Kasus di Provinsi Jawa Barat [Desertasi]. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

¹⁵ Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.

komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.¹⁶” Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani, menjelaskan bahwa: “Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.” Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.¹⁷

¹⁶ Jamasy, O. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta Selatan: Blantika.

¹⁷ Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gaya Media.